

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 23C UUD 1945 menyebutkan bahwa “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan hal tersebut, dibentuk tiga paket (UU) undang-undang keuangan negara yang menandai Reformasi keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa dalam rangka penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan itu, pada Pasal 58 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan lebih lanjut untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dan membentuk peraturan pemerintah mengenai hal tersebut. Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun

2004 dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur mengenai sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai agar terwujudnya tujuan organisasi yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah kabupaten/kota, peran aparat pengawasan intern pemerintah di kabupaten/kota diselenggarakan oleh inspektorat kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Pada masa pandemi *Covid-19*, terdapat banyak sektor yang terkena dampak dari pandemi ini, khususnya pada pengelolaan keuangan negara yang mengalami banyak perubahan pada kebijakan dan peraturan untuk menghadapi dampak pandemi dan memulihkan ekonomi. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Presiden Republik Indonesia memerintahkan untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penanganan *Covid-19*. kemudian terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Akibat dari perubahan APBN ini, perubahan juga terjadi pada anggaran dan kegiatan sistem pengendalian intern pemerintah, salah satunya yaitu sistem pengendalian intern pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir bidang Pengelolaan Keuangan Negara dengan judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN BENGKULU SELATAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap sistem pengendalian intern pada inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap penganggaran pada inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan?
3. Bagaimana pengaruh dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja Inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan sebagai APIP?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Mengetahui pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap penganggaran pada inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Mengetahui pengaruh dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja Inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan sebagai APIP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa terdapat lima unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Ruang lingkup pada karya tulis ini akan berfokus dan dibatasi pada perubahan penganggaran dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebelum dan saat masa pandemi untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan serta temuan atas kelemahan SPIP Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 dan 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Teoretis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan pada mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara.

b. Praktis

1. Bagi penulis diharapkan karya tulis ini dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan penulis tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang dari topik dan judul yang diambil oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penulisan yang akan dicapai dari penulisan, ruang lingkup pembahasan mengenai batasan dan terfokus pada topik yang diambil, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis agar mendapatkan data yang relevan pada topik yang akan dibahas mengenai SPIP.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan memaparkan teori mengenai sistem pengendalian intern secara umum menurut para ahli dan dasar hukum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut undang-undang, dan teori lainnya yang akan menjadi landasan dari berbagai sumber buku, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, dll.